

## MELACAK AKAR PERMASALAHAN GELANDANGAN PENGEMIS (GEPENG)

### *SEEKING THE ROOT OF THE PROBLEMS OF BEGGAR AND HOMELESS*

**Sri Kuntari dan Eny Hikmawati**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)  
Kementerian Sosial RI, Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Yogyakarta Indonesia.  
Telp. (0274) 377265,

*E-mail: srikuntari48@yahoo.com dan enyhikmawati59@gmail.com*

Naskah diterima 23 Desember 2016, direvisi 16 Januari 2017, disetujui 2 Februari 2017

#### **Abstract**

*The goal of the research is to know the root problem of beggars and homeless. Metodologically the approach used in this research is qualitative-descriptive. The research took place in Muntigunung sub village, West Tianyar Village, Kubu Sub District, Karangasem Regency, Bali Province under the consideration in the sub village found many beggars vragranting in several regencies in Bali. The research targets ditermined as they are beggar who were caught and placed at Karangasem Social Agency, local security and order agents, and social guide at Kubu Sub District who know alot on beggar and homeless. Data were gathered throuh interview and documentary analysis. Data analyzed through qualitative-descriptive technique. The research reveals that 95 percent beggar and homeless were women and some of them bringing children underfives. The decision to vagrant based on permission by their husbands and pushd by economic and poverty factors, geography handicap of the place of origin, including social psichology and cultural factors. The promising income caused them reluctant working in other sector. To stop their work, the Ministry of Social Affairs through Karangasem Social Agency has educated them through skill work and capital assistantanceRp 5.000.000,- per person. It recommended that it needs work group and associasional forum to accomodate and overcome problems faced by beggar and homeless then can be overcome by competent institution.*

**Keywords: Beggars and Homeless, Problems.**

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui berbagai akar permasalahan yang dialami gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Dusun Muntigunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dengan pertimbangan masyarakat daerah ini banyak yang menjadi pengemis dengan cara menggelandang di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive* didasarkan pada kriteria tertentu, yakni gepeng yang terjaring razia satuan polisi pamong praja dan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, petugas dinas sosial yang menangani gepeng, dan pendamping sosial dari Kecamatan Kubu yang mengetahui permasalahan gepeng. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengungkap bahwa 95 persen gepeng adalah perempuan dan beberapa diantaranya membawa anak balita. Keputusan menggepeng atas persetujuan suami dengan alasan faktor ekonomi atau kemiskinan, kendala geografis daerah asal, serta adanya faktor sosial psikologis dan sosial budaya. Penghasilan yang relatif banyak dari mengemis menyebabkan mereka enggan melakukan pekerjaan lain. Agar gepeng berhenti

dari mengemis, Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah melakukan pembinaan berupa bimbingan keterampilan disertai pemberian modal usaha sebesar Rp 5.000.000,- per orang. Rekomendasi yang diajukan diantaranya adalah pembentukan kelompok kerja dan forum paguyuban eks gepeng. Fungsi forum adalah untuk menampung dan mengatasi berbagai permasalahan yang dialami eks gepeng yang selanjutnya dapat diatasi oleh instansi yang berwenang.

**Kata Kunci: Gelandangan, Pengemis, Permasalahan.**

## **A. PENDAHULUAN**

Gelandangan pengemis (gepeng) merupakan masalah sosial yang dialami hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Kabupaten ini merupakan daerah yang salah satu wilayahnya, yaitu Dusun Munti Gunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu, warganya banyak yang berprofesi menjadi gepeng. Keberadaangepengyangsebagianbesarberasal dari wilayah Kabupaten Karangasem menjadi masalah yang dihadapi semua kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang telah berulang kali menangkap dan memulangkan mereka, namun belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut. Gelandangan diartikan sebagai orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup menggelandang di tempat umum. Sedang pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Depsos, 2003).

Sepintas keberadaan gepeng memang tidak menimbulkan permasalahan, namun apabila ditilik lebih lanjut, gepeng dapat meresahkan masyarakat, menimbulkan gangguan kamtibmas, dan gangguan terhadap lingkungan. Kehadiran mereka oleh sebagian orang dianggap mengotori dan bercitra negatif, serta dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kesusilaan, kebersihan, dan ketenteraman masyarakat. Gepeng tidak memiliki tempat tinggal tetap, mereka memilih tidur di emper toko, pasar, taman, dan tempat lainnya yang dianggap nyaman. Tempat tinggal bukan merupakan

permasalahan yang penting bagi gepeng asal dapat untuk tidur dan tidak kehabisan sudah cukup. Menurut Tosi seperti dikutip Twikromo (1999), masalah yang dihadapi gepeng bukan semata-mata masalah tempat tinggal, tetapi lebih pada masalah hubungan sosial budaya, yakni ketidakmampuan mereka dalam mengikuti aturan kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mereka terpinggirkan dan terkucil dari tatanan kehidupan masyarakat di tempat tujuan.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial pada tahun 2015 jumlah gelandangan sebanyak 18.599 orang dan pengemis sebanyak 178.262 orang. Jumlah ini dapat bertambah apabila pendataan bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Keberadaan gepeng dialami oleh berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Data yang tersimpan di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem mengungkap bahwa pada tahun 2015 jumlah gepeng yang berasal dari Dusun Muntigunung sebanyak 77 KK (225 jiwa) dan dari Dusun Pedahan (Koja dan Kelod) sebanyak 21 KK (71 jiwa). Data tersebut merupakan perkiraan karena untuk menentukan jumlah yang pasti mengalami kesulitan terkait cara hidup gepeng yang tidak menetap dan mempunyai mobilitas yang tinggi.

Pada tanggal 27 April 2016 sebanyak 50 orang gepeng terkena razia petugas Satpol PP Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Gepeng yang terjaring razia berasal dari Kabupaten Karangasem, karenanya diantarkan kembali ke Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, puluhan gepeng yang terkena razia setelah dilakukan registrasi kemudian dipulangkan kembali ke daerah asal dan diserahterimakan

dari dinas sosial kepada pemerintah kecamatan serta pemerintah desa tempat gepeng berasal. Ikhwal ini terpaksa dilakukan karena pemerintah Provinsi Bali belum memiliki Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Penertiban gepeng dengan razia dianggap masih kurang maksimal karena sekarang ditangkap dan dikembalikan, namun hari selanjutnya mereka akan mengemis lagi. Sebagian besar gepeng yang terkena razia adalah orang yang sudah lebih dari satu kali terkena razia dan mereka masih berusia produktif.

Dinas sosial telah menangani permasalahan kesejahteraan sosial sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap 26 jenis masalah yang digolongkan menjadi lima kelompok besar, yaitu keterlantaran, kecacatan, kemiskinan, ketunasosialan, dan korban bencana, dengan prioritas penanganan kemiskinan. Hal ini dikarenakan adanya kemiskinan cenderung akan melahirkan perangkap kemiskinan keluarga pada generasi berikutnya. Kantong-kantong kemiskinan masih dapat ditemui pada beberapa desa di Kabupaten Karangasem yang mengakibatkan salah satu desa di Kecamatan Kubu terkenal karena banyak warga masyarakat menjadi gepeng. Dengan adanya permasalahan tersebut dinas sosial Kabupaten Karangasem telah menjadikan gepeng sebagai prioritas penanganan. Dinas sosial telah mendata dan membina gepeng seperti yang berasal dari Dusun Muntigunung melalui pembinaan dan pelatihan *home industry* sesuai dengan potensi daerah tersebut. Pelatihan yang pernah diberikan berupa pembuatan gula merah, dan anyaman yang dilakukan bersama instansi terkait. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun permasalahan gepeng belum juga dapat diatasi terbukti sampai sekarang gepeng masih saja ditemui di Provinsi Bali dan sebagian dari mereka berasal dari Dusun Muntigunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Berdasarkan permasalahan tersebut menarik untuk dilakukan kajian mengenai akar permasalahan penyebab sejumlah warga Dusun Muntigunung menjadi

gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Sosial RI, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (RSTS) untuk menentukan arah kebijakan penanganan permasalahan gepeng, terutama di daerah asal gepeng.

## B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dirancang dalam bentuk kajian deskriptif kualitatif karena tidak menguji hipotesis, tetapi berupaya menggambarkan obyek yang diteliti apa adanya. Suharsimi (2001) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak menguji hipotesis melainkan berupaya menggambarkan secara obyektif obyek yang diteliti secara tepat. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif menurut Consuelo yang dikutip Tursilarini (2015), adalah menggambarkan suatu masalah pada saat penelitian sedang dilakukan, melihat sebab-sebab dari masalah dan menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan masalah tersebut. Lokasi penelitian ditentukan di Dusun Muntigunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dengan pertimbangan di daerah ini banyak penduduknya menjadi gepeng.

Informan terdiri dari tiga orang aparat dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, seorang pendamping sosial yang berasal dari Dusun Muntigunung, serta 15 orang gepeng yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja Ubud Gianyar. Gepeng hasil razia yang berasal dari Kabupaten Karangasem diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem untuk didata dan dipulangkan ke daerah asalnya, yaitu Dusun Muntigunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu. Pengumpulan data menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan telaah dokumen. Pelaksanaan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan tujuan mengungkap, mengetahui, memahami, dan menganalisis akar masalah yang menyebabkan mereka memilih menjadi gepeng. Penelusuran data juga dilakukan dengan menggunakan cara

telaah dokumen dari data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran umum lokasi penelitian

Kabupaten Karangasem dengan ibukota Amlapura merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Secara geografis letak kabupaten ini berada di ujung timur yang berjarak 80 Km dari Kota Denpasar. Wilayah ini dikelilingi pantai dan pegunungan seluas 839,54 Km<sup>2</sup> atau 14,90 persen dari luas wilayah Provinsi Bali. Kabupaten Karangasem mempunyai topografi bervariasi meliputi dataran, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi alam Kabupaten Karangasem berupa perbukitan dan pegunungan seluas 76,814 Ha (91,50%) dan hanya sekitar 7,140 Ha (8,50%) merupakan lahan persawahan. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Karangasem, Abang, Kubu, Sidemen, Bebandem, Selat, Rendang, dan Manggis. Dari delapan kecamatan terdiri dari 78 desa/kalurahan, 532 banjar dinas, dan 52 lingkungan. Secara adat terdiri dari 189 desa adat dengan 605 banjar adat. Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2014 sebanyak 404.300 jiwa, terdiri dari 202.100 jiwa perempuan dan 202.100 jiwa laki-laki. Pertumbuhan penduduk sebesar 12 persen, dengan kepadatan penduduk sebanyak 545 jiwa per km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk Kabupaten Karangasem beragama Hindu yang sangat religius, sehingga hampir setiap hari dipastikan ada aktivitas ritual keagamaan.

Kabupaten Karangasem, seperti kabupaten lain di Provinsi Bali, memiliki berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karangasem berakar dari kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari jenis permasalahan kesejahteraan sosial yang bersumber dari kondisi kemiskinan diantaranya adalah fakir miskin 24.061 jiwa, keluarga yang

berumah tidak layak huni 3.924 jiwa, lanjut usia terlantar 3.629 jiwa, dan anak terlantar 1.017 jiwa. Akibat kemiskinan, maka banyak warga Kecamatan Kubu menjadi pengemis. Dari hasil survey dan pemetaan yang dilakukan Dinas Sosial Karangasem pada tahun 2016, sebanyak 242 KK (404 jiwa) gepeng berasal dari Dusun Muntigunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu, namun hingga saat ini yang aktif menjadi gepeng hanya separohnya, yaitu 112 KK atau 256 jiwa.

Secara geografis Dusun Muntigunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu terletak pada lereng yang curam di sebelah Timur Gunung Batur, karena kondisi ini Dusun Munti sering disebut Muntigunung. Dusun ini merupakan daerah berbukit yang cukup gersang dikarenakan dampak dari letusan Gunung Agung pada tahun 1963. Luas wilayah lebih dari 900 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 4.614 jiwa (1.188 KK). Secara keseluruhan beragama Hindu dengan kultur yang sangat kuat. Dusun ini dikenal sebagai dusun miskin, karena secara geografis merupakan daerah kering dengan tekstur tanah liat berdebu, berbatu, dan sedikit pasir berdebu. Kondisi tanah bergelombang, labil dan belum tertata sehingga menyulitkan upaya pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

Dusun Muntigunung termasuk daerah gersang dan tandus dengan letak air tanah yang cukup dalam ditambah minimnya daerah resapan air, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan air warga masyarakat membuat tandon air hujan (*cubang*). Namun dikala tiba musim kemarau *cubang* tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air, sehingga warga masyarakat harus membeli air dengan mengeluarkan uang berkisar antara Rp 150.000,- - Rp 200.000,- per tangki. Kelangkaan air bersih menjadi permasalahan tersendiri bagi warga masyarakat Muntigunung. Tanaman pangan yang banyak dibudidayakan warga adalah jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah, dan buah-buahan, seperti mangga, rambutan, dan pisang. Jenis ternak yang dibudidayakan adalah ayam, kambing, babi, dan sapi. Penguasaan lahan oleh keluarga miskin relatif sempit yaitu berkisar

38,23 are dengan kondisi lahan yang tandus, kritis, dan kurangnya ketersediaan air. Kondisi ini menyebabkan keluarga miskin sulit keluar dari kemiskinannya.

Kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat Dusun Muntigunung senada dengan yang digambarkan Harris dalam Sedana (2011) yang menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan keterbatasan faktor geografis (daerahnya terpencil atau terisolasi, dan terbatasnya prasarana dan sarana), ekologi (keadaan sumber daya tanah/lahan dan air serta cuaca yang tidak mendukung), dan teknologi yaitu kesederhanaan sistem teknologi untuk memproduksi, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penghasilannya. Kondisi ini menyebabkan banyak keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, sehingga memilih keluar desa pergi ke kota mencari penghidupan. Sebagian diantara mereka tidak memiliki keterampilan dan berpendidikan rendah, sehingga pekerjaan yang mampu dilakukan dan mudah mendapatkan uang adalah mengemis. Pekerjaan ini mereka lakukan, terutama ketika musim kemarau atau ketika pekerjaan bertani sudah selesai.

Sebenarnya tidak pernah dijumpai dalam sejarah warga masyarakat Kecamatan Kubu, khususnya di Dusun Muntigunung yang menjadi gepeng walaupun kondisi wilayahnya kering. Dari penjelasan informan WYS (35 tahun), pada zaman dahulu orang-orang tua kami dan warga masyarakat desa banyak yang turun ke kota dengan membawa hasil bumi seperti jagung, gula merah dan nira dari pohon lontar untuk ditukar dengan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, garam dan kebutuhan lainnya. Kegiatan tukar barang seperti ini disebut *meurep-urep* (melakukan barter dengan masyarakat di desa lain yang lebih makmur). Namun dengan seiring berjalannya waktu beberapa warga Muntigunung yang turun ke kota tidak lagi membawa hasil kebun melainkan berkeliling dari rumah ke rumah penduduk kota untuk memintaminta dengan membawa anaknya yang masih kecil dengan harapan orang akan menaruh rasa iba pada mereka.

Penjelasan pendamping sosial ARS menyatakan akibat dari pesatnya perkembangan pariwisata, orang kota lebih banyak yang memberi uang tanpa ada proses barter lagi, sehingga warga Muntigunung tidak mau repot lagi membawa beban berat berupa barang dari desa dibawa ke kota untuk ditukar dengan bahan kebutuhan hidup. Mereka memilih usaha yang lebih praktis yaitu meminta-minta dan akhirnya menjadi matapencaharian. Dari kegiatan meminta-minta ternyata hasilnya cukup banyak dan dapat digunakan untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Melihat hasil yang cukup banyak, maka beberapa warga miskin Muntigunung mengikuti jejak tetangganya menjadi peminta-minta (pengemis) dan semakin banyak orang yang menjadi pengemis. Karena tidak mungkin setiap hari pulang-pergi dari desa, sementara di kota tidak mempunyai tempat tinggal, maka sebagian dari mereka memilih hidup menggelandang dengan pekerjaan sebagai pengemis (gepeng). Menggelandang dengan membawa anak balita sebenarnya sangat riskan dalam hal keamanan, karenanya sebagian gepeng memilih mengontrak kamar/kos di kota agar keamanannya lebih terjaga. Interpretasi terhadap gelandangan, lingkungan dan cara hidupnya dapat memberi gambaran tentang kehidupan dan strategi mereka, terutama usaha mereka untuk bertahan hidup di perkotaan. Hal ini penting untuk memberikan makna kehidupan kaum gelandangan sesuai dengan konteks kehidupan jalanan dan kenyataan sehari-hari yang mereka hadapi (Twikromo, 1999).

### **Kondisi gepeng warga Dusun Muntigunung**

Informan adalah gepeng hasil razia dari Kabupaten Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar yang berasal dari Dusun Muntigunung dan sempat diwawancarai saat dilakukan pendataan di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Mereka ditangkap di beberapa lokasi yaitu dari Gianyar, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.

#### **a. Umur dan Tingkat Pendidikan Informan**

Dilihat dari usia informan cukup bervariasi mulai dari usia anak-anak sampai lanjut usia. Dari hasil wawancara terdapat kecenderungan kelompok usia produktif terutama usia antara

18 sampai 40 tahun sebanyak 11 orang, dari sebelas orang yang masih terbilang usia muda selama menjadi gepeng di kota sebanyak 8 orang membawa serta anak mereka yang masih balita. Penjelasan salah satu informan KRSR yang masih berusia 18 tahun, dia menikah pada usia 16 tahun, pernikahan dini di Dusun Muntigunung sudah menjadi hal yang biasa hal ini lebih dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi kemiskinan orangtua sehingga anaknya didorong cepat menikah agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, padahal secara ekonomi mereka belum siap dalam arti pihak suami belum memiliki pekerjaan yang mampu menopang kehidupan rumahtangganya, sehingga setelah menikah untuk mencukupi kebutuhan hidup bekerja seadanya sebagai buruh.

Hasil survey yang dilakukan Plan International yang dimuat dalam liputan 6.com di Jakarta pada hari Kamis 12/11/2015, menunjukkan di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan pada anak dan remaja sebanyak 36 persen anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah, sementara laki-laki sebanyak 3,7 persen. Sementara hasil survey yang dilakukan di Indonesia, Banglades dan Pakistan, ditemukan faktor pendorong anak dan remaja melakukan pernikahan dini adalah karena rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi terutama untuk anak perempuan, kemiskinan serta masih kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat di perdesaan yang mendorong anak perempuan menikah dini. Lebih lanjut informan menjelaskan, dalam rangka membantu suami memenuhi kebutuhan hidup informan terpaksa membawa anaknya yang masih enam bulan ke kota memang bertujuan menjadi gepeng seperti yang dilakukan beberapa tetangganya, alasan yang dikemukakan karena jika musim kemarau lahan tegalan di desa tidak bisa ditanami tanaman pangan sehingga suaminya harus keluar desa bekerja menjadi buruh cangkul di perkebunan jeruk di Kintamani. Bahkan informan NKS (28 th) membawa serta dua anaknya yang masih berusia 2 tahun dan empat bulan, dengan alasan yang sama yaitu

di rumah tidak ada yang merawat sementara suami bekerja sebagai buruh cangkul, mereka tidur di sembarang tempat seperti di emper toko dengan beralaskan kardus, sehingga akan menimbulkan berbagai kerawanan baik dari segi kesehatan maupun keamanan.

Anak menurut mereka dipandang bernilai ekonomi karena dengan mengajak anak akan dapat menimbulkan rasa belas kasihan sehingga diharapkan akan mendapatkan uang lebih banyak dibandingkan dengan menggepeng sendiri, padahal anak apalagi yang masih balita seharusnya mendapatkan perlindungan baik fisik maupun psikisnya. Jika merujuk Undang-Undang Perlindungan anak nomor 24 tahun 2001 yang melarang orangtua mengeksploitasi anak dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan. Informan yang mengajak anak yang masih balita bisa dianggap mengeksploitasi anak karena diajak berkeliling di jalan dan mengabaikan keselamatan dan sekolah anak. Menurut Aswarni (1999) masa anak merupakan masa strategis sekaligus kritis, strategis karena pada masa tersebut merupakan masa peka untuk memperoleh stimulan dan pembelajaran yang memungkinkan anak dikondisikan memperoleh keberhasilan. Kritis, apabila terjadi salah asuh dapat menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan selanjutnya. Dalam konteks permasalahan anak gepeng, jika mereka tetap diajak menjadi gepeng kemungkinan akan memperoleh pembelajaran yang keliru yang dapat membentuk sikap, tingkah laku peniruan seperti yang dilakukan orangtua yang kemungkinan akan menjadi generasi gepeng berikutnya.

Informan dengan rentang usia 41 sampai 60 tahun sebanyak 3 orang, mereka bertiga merupakan janda yang harus menghidupi dirinya sendiri, sementara anak-anaknya sudah berkeluarga dengan kondisi ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi orangtuanya. Informan yang sudah mulai berusia lanjut tidak mampu lagi mencangkul di tanah tandus dengan hasil yang masih lama ditunggu, padahal kebutuhan hidup sehari-hari tidak mungkin ditunda. Tanpa bekal keterampilan, usia yang sudah mulai lanjut

dan tidak memiliki pendidikan, informan pergi ke kota mencari penghidupan karena menurut mereka di kota tetap menjanjikan penghidupan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Musni Umar yang dikutip Ikawati (2015) bahwa pencari kerja yang tidak memiliki kepakaran, keahlian, keterampilan dan tingkat pendidikan yang tidak memadai akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

Informan NKL (60 th) menyatakan tidak mampu lagi bekerja di ladang padahal kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi sendiri. Hal ini mendorong informan meninggalkan desa pergi ke kota mencari penghidupan yang lebih baik walaupun dengan menjadi gepeng. Penjelasan dari informan sesuai dengan hasil penelitian Hugo yang dikutip Abdul Haris (2002) bahwa penyebab seseorang mencari pekerjaan di luar daerah asal dikarenakan kondisi ekonomi. Ada satu anak laki-laki dengan inisial KT berusia 12 tahun yang ikut terjaring dalam razia Satpol PP Provinsi Bali yang kemudian dikembalikan ke daerah asal bersama-sama dengan rombongan gepeng dari Kabupaten Karangasem. KT (12 tahun) menjelaskan dia sedang berjualan souvenir berupa gelang anyaman dari benang yang dibuat ayahnya, informan menjual dagangannya di perempatan lampu merah, *saya tidak mengemis hanya menjual gelang-gelang ini, tapi kalau ada yang ngasih ya saya terima*, lebih lanjut dia menjelaskan *saya lebih senang di kota daripada di desa saya yang sulit air, di rumah tidak ada makanan, walaupun saya tidak pulang ke rumah dan tidur di emper toko orangtua saya tidak melarang*.

Penjelasan yang diperoleh dari petugas pendata Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, memang terkadang anak-anak yang sudah agak besar disuruh mengemis sendiri untuk melindungi mereka dari razia, orangtuanya sering membekali sejenis souvenir sederhana sehingga anak-anak ini tidak terlihat sebagai pengemis, tetapi sebenarnya mereka sudah diijinkan bahkan mungkin disuruh oleh orangtuanya. Jika mengemis diartikan sebagai pekerjaan mereka, maka anak-anak yang bekerja dikarenakan kemiskinan yang dialami orangtuanya, dan kondisi ini berlangsung

terus menerus maka anak akan dapat menjadi korban *trafficking* (Tadjuddin Noer Effendi dalam Ikawati, 2015).

Jika dilihat dari tingkat pendidikan sebanyak 9 orang tidak pernah mengenyam pendidikan, empat orang tidak dapat menamatkan pendidikan dan hanya dua orang yang mampu menamatkan sekolah dasar. Tidak adanya bekal pendidikan yang cukup menjadi salah satu penyebab ketidakberdayaan mereka memperoleh pekerjaan yang layak. Dari hasil wawancara dengan informan NNS (35 tahun) yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan menyatakan sebagian besar teman-teman gepeng memang tidak mempunyai pendidikan yang cukup bahkan seperti dirinya tidak pernah sekolah, hal ini dikarenakan sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi keluarga mereka pada saat masih kecil. Pada saat itu, mereka dibesarkan dalam keluarga yang tidak berpendidikan dan juga dalam kondisi miskin, sehingga penghasilan orangtua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-haripun tidak cukup, apalagi untuk biaya sekolah karena waktu itu belum ada bantuan sosial untuk anak sekolah.

Kondisi sosial ekonomi keluarga NNS saat masih kecil dan beberapa gepeng lainnya yang menyebabkan mereka tidak mampu mengakses pendidikan dan pola ini juga dilakukan oleh NNS dan teman-temannya sekarang dengan kurang memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya hal ini terlihat gepeng yang masih berusia sekolah (KT, 12 tahun) yang masih berusia sekolah juga terjaring karena menjadi gepeng. Kondisi ini senada dengan pendapat Sumodiningrat (2000) yang menyatakan bahwa rumahtangga miskin menanggung beban sosial ekonomi lebih besar dibanding rumahtangga tidak miskin, dan beban rumahtangga miskin di daerah perdesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih besar daripada rumahtangga miskin di daerah perkotaan, dan tingkat pendidikan kepala rumahtangga miskin rendah serta penghasilan utama rumahtangga miskin di perdesaan bersumber pada kegiatan sektor pertanian. Dari hasil penelusuran orangtua KT belum mendapat bantuan PKH dan KT sudah

tidak sekolah, sementara dari penjelasan yang diberikan oleh pendamping sosial untuk tahun 2016 telah didata ulang terhadap keluarga yang seharusnya mendapatkan program PKH untuk kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.

#### b. Penghasilan Informan

Dari hasil wawancara dengan informan, mengemis pada awalnya dilatar belakangi dari kondisi kemiskinan yang dialami keluarga, hal ini dikarenakan ketidakpastian penghasilan yang diperoleh kepala keluarga sehingga untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup istri berusaha membantu mencari nafkah dengan keluar dari desa menuju ke kota, karena tidak mempunyai cukup keterampilan dan dengan tingkat pendidikan yang rendah mereka mencari uang dengan cara yang mudah dengan mengemis. Penghasilan informan sebagai gepeng bervariasi, tidak dapat dipastikan sehari dapat berapa disamping tergantung banyak tidaknya orang yang memberi juga dimana mereka meminta-minta jika dilakukan di pasar atau keliling dari rumah ke rumah akan mendapatkan banyak penghasilan dibandingkan mengemis di lampu merah yang harus sembunyi sembunyi takut ada petugas. Selain itu ternyata faktor usia dan membawa anak kecil juga menentukan penghasilan mereka karena rasa iba dan belas kasihan orang akan muncul jika melihat ibu dengan membawa bayi atau orang yang sudah tua berkeliling meminta-minta. Dari seluruh informan menyatakan bahwa penghasilan mereka berkisar antara 40 sampai 60 ribu, tetapi jika ditelusuri lebih lanjut ternyata penghasilan mereka bisa mencapai 100 ribu bahkan lebih dalam sehari, hal ini terlihat dari jawaban mereka saat ditanya, sehari makan berapa kali mereka menyatakan kadang 2 kali dengan cara membeli sekali makan Rp 5000,-, minum pun mereka membeli air mineral, es teh, bahkan ada yang membeli minuman kemasan dengan harga yang mahal, jika membawa anak masih membeli makanan kecil untuk anaknya.

Dari hasil pendalaman wawancara dengan informan NKSG (40 tahun), dia membawa serta dua anaknya yang masih berusia satu dan tiga

tahun, dia mengontrak kamar dengan harga Rp 200.000 per bulan yang ditempati selama dia berada di kota, untuk memenuhi kebutuhan makan selama mereka berada di kota dengan cara membeli di warung makan, untuk anak yang tiga tahun makan tiga kali sedang anak yang satu tahun dengan dibelikan bubur bayi instan, untuk membeli pulsa karena HP sudah bukan barang baru bagi mereka, sehingga pengeluaran sehari bisa mencapai kurang lebih Rp 40.000,-. Tidak dipungkiri dengan membawa serta dua anaknya penghasilan yang diperoleh bisa lebih dibandingkan dengan gepeng yang tidak membawa anak, dinyatakan sehari bisa sisa antara Rp 50.000,- sampai Rp 70.000,-, untuk dibawa pulang terkadang seminggu sekali atau tergantung kepentingan. Penghasilan yang mereka peroleh digunakan untuk membeli keperluan keluarga seperti beras dan keperluan sehari-hari mereka, membeli pulsa bahkan untuk mencicil sepeda motor yang digunakan suami bekerja.

Dari seluruh informan sebanyak 11 orang masih mempunyai suami, yang bekerja sebagai buruh tani di ladang dan perkebunan. Para suami dari ibu-ibu yang menggepeng mempunyai andil para istri terus ke kota menjadi pengemis bersama anaknya. Bagi mereka anak tidak sekolah bukan merupakan permasalahan karena menurut mereka nantinya juga akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan, dan memang anaknya juga malas untuk sekolah, sehingga anak diajak mengemis. Dari penjelasan seluruh informan yang masih mempunyai suami, ternyata suami mereka bekerja sebagai buruh di ladang atau perkebunan dengan upah antara Rp 50.000 sampai Rp 65.000 per hari, namun jika dibandingkan dengan penghasilan suami, penghasilan yang diperoleh istri sebagai gepeng relatif lebih besar, sehingga para suami tetap mengizinkan istri pergi ke kota menjadi gepeng, hal ini dijelaskan oleh informan NKS (35 tahun) yang menyatakan suaminya bekerja di perkebunan sebagai buruh cangkul dengan upah sebesar Rp 60.000 per hari. Informan mengemis bukan karena tidak ada lapangan pekerjaan, tetapi karena adanya faktor malas, hal ini dikarenakan pekerjaan mengemis



lebih menguntungkan dan penghasilan yang diperoleh lebih banyak dibandingkan sebagai petani atau buruh yang masih harus bekerja keras. Padahal sebagian besar informan masih berusia produktif, sehingga sebenarnya masih mampu dan bisa berusaha dan bekerja dengan pekerjaan yang lebih layak, tetapi karena informan tidak lagi mempunyai rasa malu dan mereka merasa mempunyai kebebasan karena tidak ada yang melarang apapun yang akan mereka lakukan.

Menurut informan untuk menjadi pengemis tidak membutuhkan keterampilan hanya bermodal baju lusuh dengan wajah memelas dan membawa anak kecil sudah mampu menimbulkan rasa iba sehingga dengan mudah mendapatkan sedekah dari orang kota, hal demikian yang menyebabkan mereka lebih mempertahankan pekerjaannya sebagai pengemis. Bagi informan mengemis sudah menjadi kegiatan ekonomi yang menggiurkan, pada awalnya mengemis karena kondisi kemiskinan keluarga, namun setelah mengemis dijadikan ladang pekerjaan mereka mampu mengumpulkan uang yang tidak sedikit bahkan mampu menabung dan memperbaiki rumah, sehingga mereka tetap akan menjadi karena mengemis mereka jadikan pekerjaan yang dapat menjanjikan penghasilan yang banyak. Jadi alasan mengemis karena tidak memiliki aset atau ketidakberdayaan ekonomi, untuk tipe pengemis seperti ini tidak berlaku lagi. Pengemis sudah merasa keenakan, tanpa rasa malu dan tanpa beban moril di depan masyarakat, mengemis karena miskin mental, mereka tidak tergolong miskin sepenuhnya, namun ketika mengemis penampilan akan berubah menjadi lusuh dan kumal untuk membangun rasa belas kasihan orang lain. Pengemis seperti ini tergolong individu yang sangat malas bekerja dan potensial mengemis sebagai bentuk kegiatan profesi (Safri Mangkuprawiro, 2010).

### **Akar Permasalahan warga Dusun Muntigunung menjadi gepeng**

Menurut penjelasan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Karangasem, Permasalahan kesejahteraan sosial terbesar

yang ada di Kabupaten Karangasem adalah masalah kemiskinan yang secara umum disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang masih timpang, selain hal tersebut kemiskinan juga disebabkan karena kondisi geografis dan faktor struktural terutama di empat kecamatan yaitu Kecamatan Kubu, Abang, Bebandem dan Karangasem. Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan yang dikutip Sutomo (2008) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, yang mana karena struktur sosial masyarakat tersebut, mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Dilihat dari data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem jumlah fakir miskin pada tahun 2012 sebanyak 15.973 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2015 dengan jumlah 24.061 sehingga jika dihitung selama empat tahun kenaikan jumlah fakir miskin sebanyak 8.088. Kenaikan jumlah fakir miskin ternyata juga menyebabkan adanya kenaikan jumlah anak terlantar yang dari tahun 2012 sebesar 621 naik menjadi 1017 pada tahun 2015, selain itu banyak warga yang menjadi pemulung dan pengemis, warga Karangasem yang menjadi pengemis sebagian besar berasal dari Desa Tianyar Barat dan Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, dimana daerah tersebut berada di lereng yang curam di sebelah timur Gunung Batur yang tandus dan kering sehingga kondisi alam seperti ini yang menjadi alasan sebagian warga Kecamatan Kubu turun ke kota menjadi pemulung dan pengemis.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem menjelaskan, gepeng berasal dari wilayah Kecamatan Kubu, khususnya dari Desa Tianyar Barat dan Tengah, sampai saat ini jumlah gepeng yang masih aktif menggepeng berjumlah 112 KK atau 256 jiwa. Jika diperinci gepeng dari Desa Tianyar Barat yang masih aktif menjadi gepeng berjumlah sebanyak 68 Kk (148 jiwa). Secara lebih terperinci mereka berasal dari Banjar Muntigunung 9 KK (16 jiwa), Muntigunung Tengah 18 KK (33 jiwa), Muntigunung Kangin 24 jiwa (55 jiwa) dan Muntigunung Kauh sebanyak 33 KK atau 68 jiwa. Lebih lanjut Kadis Sosial menjelaskan, gepeng yang berasal dari Desa

Tiaryar Tengah yang masih aktif menggengeng sebanyak 44 KK atau 108 jiwa, mereka berasal dari Banjar Pedahan Kelod 7 orang, Pedahan Kaja 5 orang, Padangsari 89 orang, Dalem 21 orang, Peliasan 11 orang, Moncol 2 orang, Bukit lambuh 59 orang, dan Sangsan 12 orang, serta Bunglada 30 orang.

Ada 50 orang gepeng yang dikembalikan petugas Satpol PP ke Dinas Sosial pada tanggal 27 April 2016. Menurut Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Karangasem, puluhan gepeng yang terkena razia setelah diregistrasi dipulangkan ke daerah asal dan diserahkan antara Dinas Sosial dan pihak kecamatan dan desa dimana para gepeng berasal, hal ini dikarenakan Kabupaten Karangasem belum memiliki panti sosial yang menangani gepeng. Lebih lanjut dijelaskan sebenarnya penertiban seperti ini tidak maksimal karena saat ini ditangkap dan dipulangkan besok mereka menggengeng lagi, karena dari data yang ada di dinas sosial banyak gepeng yang terjaring razia lebih dari sekali, artinya mereka ini setelah dipulangkan akan kembali menggengeng dan terjaring lagi.

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan gepeng berkait erat dengan permasalahan kemiskinan, dimana permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan merupakan akar muncul dan berkembangnya permasalahan sosial lain diantaranya anak terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga berumah tidak layak huni dan keluarga rawan sosial ekonomi, dalam hal ini kemiskinan dimaknai sebagai suatu kondisi ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang, sekelompok orang atau suatu masyarakat baik secara ekonomi, sosial, psikis, politik maupun budaya dalam mewujudkan kehidupan yang layak secara manusiawi dan bermartabat. Definisi kemiskinan yang multidimensi ini dapat diartikan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena beragam faktor tergantung dari sudut pandang mana akan dikaji. Istiana Hermawati dkk (2015), memberikan pandangan konsep kemiskinan memiliki lima dimensi yaitu ekonomi, sosial, psikis, politik dan budaya. Kemiskinan secara

ekonomi, dapat didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan keluarga dalam penenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, pendidikan, akses kesehatan dan pekerjaan dan kepemilikan aset. Kemiskinan secara sosial diartikan jika keluarga tidak dapat berpartisipasi dan tidak terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemanusiaan, penghimpunan dana sosial, dan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi serta tidak terbiasa berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga. Kemiskinan psikis dapat diartikan keluarga merasa tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah, diri dalam mengemukakan pendapat, kurang percaya diri dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Sedang kemiskinan karena politik diartikan jika keluarga tidak pernah dilibatkan di masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyampaian aspirasi. Kemiskinan budaya diartikan jika keluarga tidak memiliki etos kerja tinggi, tidak hidup bersih dan tidak biasa menabung.

Faktor penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri orang miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan, adanya faktor sosial budaya yang tidak kondusif. Oscar Lewis (1988) dalam teori kemiskinan budaya (*cultural poverty*) menyatakan bahwa kemiskinan dapat timbul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib dan kurang memiliki etos kerja. Faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang (*struktural poverty*) seperti birokrasi yang menghambat seseorang dalam mengakses sumberdaya. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan disebabkan ketidakmampuan seseorang untuk bekerja atau malas, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan seseorang dapat mengakses sumberdaya yang dibutuhkan, dan hal ini sering disebut kemiskinan struktural. Berkait permasalahan gepeng bahwa gepeng mempunyai kelekatan dengan masalah lain, baik ekstern maupun intern seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan

pendidikan (Twikromo, 1999). Sementara itu gepeng yang berasal dari Dusun Muntigunung lebih cenderung disebabkan faktor ekonomi, sosial psikologis dan geografis.

Dilihat dari faktor ekonomi menyangkut aspek lapangan kerja, kondisi lahan pertanian sempit dan kurang subur serta ketidaktersediaan sumber penghasilan. Akses lapangan pekerjaan yang sempit, lahan pertanian terbatas dan kurang digarap secara optimal menjadi penyebab ketersediaan sumber penghasilan rendah sehingga penduduk terperangkap dalam kemiskinan. Ketidakmampuan masyarakat memanfaatkan dan mendayagunakan sumber yang tersedia menjadi alasan adanya kemiskinan yang seolah dipelihara dan cenderung akan melahirkan perangkap kemiskinan keluarga. Keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, membiayai pendidikan anak-anak. Banyak anak menjadi putus sekolah, yang seterusnya akan menjadi mata rantai kemiskinan. Hal ini terlihat dari informan KT (12 tahun) yang lebih memilih menjadi gepeng walaupun berkedok menjual cenderamata, dia lebih memilih tinggal di kota yang lebih ramai, banyak hiburan, mandi tidak mengalami kesulitan dan segala makanan dapat diperoleh. KT menjelaskan *"saya sekolah tapi ini baru tidak masuk karena membantu orangtua menjual cenderamata nanti uangnya saya bawa pulang untuk membantu orangtua, orangtua saya dirumah, saya senang di kota karena ramai, banyak teman dan beli makanan bisa macam-macam tidak seperti di rumah yang masih sepi, makan ya di rumah seadanya bu"*.

Setelah dilakukan wawancara dengan gepeng yang lebih tua diperoleh informasi bahwa sebenarnya KT sudah tidak sekolah lagi, dia lebih senang hidup di kota yang lebih ramai dengan mengemis dan sering berkedok dengan menjual gelang cenderamata yang dibawa dari rumah. Beda lagi dengan NKM (39 tahun), yang membawa dua anak berusia 4 dan 5 tahun keduanya belum sekolah dan di rumah tidak ada yang mengurus sehingga diajak menggepeng, walaupun dia sudah dua kali terkena razia Satpol PP namun ternyata tidak membuat dia jera. Penjelasan yang diberikan NKM bahwa *"saya*

*sudah dua kali tertangkap petugas, tapi ya karena di desa tidak ada yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya saya seperti teman yang lain sampai sekarang tetap mengemis. Walaupun saya pernah menerima program bantuan UEP berupa bantuan bibit babi dari pemerintah tahun 2015, tapi babi kan lama untuk bisa dijual sementara kami setiap hari harus makan, saya tidak sekolah dan tidak punya keterampilan, tanggungan keluarga ada lima orang, suami saya juga tidak pernah sekolah dan hanya buruh tani, ya hanya ini yang bisa saya lakukan"*.

Gambaran tentang kondisi yang dialami informan sesuai pendapat Sumodiningrat (2000) yang menyebutkan kondisi keluarga miskin ditandai dengan pertama, jumlah rata-rata anggota keluarga rumahtangga miskin cenderung lebih besar dibanding jumlah rata-rata anggota keluarga tidak miskin; kedua, rumahtangga miskin menanggung beban sosial ekonomi lebih besar dibanding rumahtangga tidak miskin; ketiga, beban rumahtangga miskin di daerah perdesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih besar daripada rumahtangga miskin di daerah perkotaan; keempat, tingkat kepala rumahtangga miskin rendah dan kelima, penghasilan utama rumahtangga miskin di perdesaan bersumber pada kegiatan sektor pertanian.

Faktor sosial psikologis juga menjadi penyebab informan menjadi pengemis, kondisi sosial psikologis ini menjadi menghambat keluarga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Kondisi dimaksud antara lain daya juang atau semangat juang yang rendah, mudah menyerah, kurang percaya diri, etos kerja rendah, pemalas, ketidakmampuan memanfaatkan waktu dengan hal positif dan bermanfaat, ketidakmampuan mendayagunakan potensi dan sumber yang tersedia, sulit mengikuti perubahan untuk maju dan kurang memiliki harga diri. Menurut Alkotsar (1984) terjadinya gepeng disebabkan karena adanya faktor intern dan ekstern, faktor intern berupa sifat pemalas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik maupun psikis, sedang faktor ekstern yang menjadi

penyebab seseorang menjadi pengemis adalah adanya faktor sosial kultural, ekonomi, pendidikan rendah, lingkungan agama dan letak geografis. Adanya semangat juang yang rendah dan mudah menyerah dalam bekerja mendorong mereka memilih menjadi gepeng untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Aktivitas mengemis, menadahkan tangan dari rumah ke rumah atau kepada setiap orang yang dijumpai dengan harapan mereka menaruh iba dan memberi sejumlah uang, menunjukkan mereka tidak memiliki harga diri atau memiliki harga diri yang rendah. Dari penelusuran lebih mendalam kepada informan ternyata hasil dari mengemis bisa mencapai Rp 100.000,- sampai Rp 500.000,- perhari sehingga mereka lebih memilih mengemis daripada bekerja yang layak menurut kemanusiaan. Menurut petugas Dinas Sosial Kabupaten Karangasem ada beberapa pengemis yang telah berhasil mengubah ekonomi keluarga lebih baik dari hasil mengemis seperti memperbaiki rumah, membeli sepeda motor bahkan ada yang bisa membeli mobil, dengan keberhasilan ini mendorong para tetangga mengikuti jejak mereka menjadi pengemis dengan jalan menggepeng. Sementara dari penjelasan informan NKS (25 tahun) menyatakan tidak mau bekerja lain karena dengan mengemis lebih cepat mendapatkan uang, walaupun dengan usia yang masih muda sebenarnya masih dapat bekerja dengan pekerjaan yang lebih layak, namun karena penghasilan gepeng lebih menjanjikan maka rasa malu dia buang jauh demi mendapatkan uang yang banyak agar dapat seperti gepeng lain yang mampu memperbaiki rumah dan membeli motor walaupun secara kredit.

Kondisi lingkungan sosial budaya yang tidak kondusif, etos kerja yang rendah, pemalas, menjadi belenggu masyarakat untuk maju dan mencapai kesejahteraan keluarga. Kecamatan Kubu memiliki potensi alam yang dapat dikelola penduduknya seperti banyaknya pohon lontar yang daunnya dapat dianyam dan anyaman itu setiap hari dibutuhkan masyarakat untuk tempat sesaji, tetapi karena hasilnya tidak sebanyak mengemis maka mereka lebih suka mengemis untuk mendapatkan uang. Nilai-nilai

sosial budaya yang menghambat seperti masih adanya sabung ayam di kalangan kaum lelaki, sementara kaum perempuan bekerja keras membantu suami mencari nafkah menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap etos kerja sehingga menjadi rantai kemiskinan yang sulit untuk diputus. Kondisi ekonomi, sosial psikologis, dan geografis yang menjadi rantai kemiskinan dan akar permasalahan gepeng di Kabupaten Karangasem khususnya Dusun Muntigunung, Kecamatan Tianyar Barat perlu segera ditangani agar tidak semakin meluas pemasalahannya.

### **Penanganan gepeng**

Upaya telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dan Satpol PP dengan mengadakan pertemuan dengan aparat di Dusun Muntigunung berkaitan dengan perilaku beberapa warganya yang masih memiliki mental peminta-minta, namun karena budaya kemalasan yang melekat membuat berbagai pendekatan belum membuahkan hasil. Menurut Zakiah darajad yang dikutip Kuntari (2008), orang yang sehat mental adalah orang yang terpenuhi kebutuhan mentalnya, sehingga seseorang mampu mandiri, dapat merasakan kebahagiaan hidup, merasakan bahwa dirinya masih berguna, berharga, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika merujuk pendapat Zakiah darajad sebenarnya para gepeng mempunyai mental yang sehat karena mereka merasa berharga dan berguna dalam keluarganya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di desanya, namun tidak mampu mandiri karena senang bergantung belas kasihan orang, namun sikap mental yang tidak sehat karena masih suka menengadahkan tangan menjadi peminta-minta inilah yang harus dihentikan oleh para pengambil kebijakan.

Sebagai upaya untuk membantu gepeng terentaskan dari pemasalahannya Kementerian Sosial saat ini (tahun 2016), dalam hal ini sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Dinas Sosial Kabupaten Karangasem bekerjasama dengan Yayasan Bakti Laksana melakukan rehabilitasi sosial bagi gepeng di Dusun Muntigunung. Kegiatan rehabilitasi sosial bermaksud untuk melakukan pembinaan dan latihan kerja agar mereka dapat

bekerja secara layak dan bermartabat dengan tujuan dapat memutus mata rantai kemiskinan sebagai akar permasalahan gepeng. Rehabilitasi dilakukan melalui pelatihan ekonomis produktif sesuai dengan bakat dan minat peserta yang diikuti 100 perempuan yang sehari-hari menjadi pengemis yang sudah terdata karena sudah pernah terjaring razia. Kegiatan pelatihan berlangsung selama satu minggu dengan materi pelatihan pembuatan dupa dan anyaman lontar untuk sarana upacara, pembuatan dupa diikuti 12 orang dan sisanya mengikuti pelatihan pembuatan anyaman. Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mendapatkan stimulan Rp 5.000.000,- per orang, namun kegiatan yang bertujuan untuk mengalihkan kegiatan menggengap menjadi orang yang lebih bermartabat dengan mengelola uang stimulan untuk kegiatan produktif, ternyata masih mengalami kendala seperti beberapa peserta yang berhenti ditengah jalan tidak mau mengikuti pelatihan karena nantinya tidak akan bisa lagi mengemis sehingga merasa rugi, namun dapat diganti orang lain sesama pengemis.

Kondisi sekarang informan di rumah memanfaatkan uang stimulan untuk kegiatan pembuatan dupa dan anyaman daun lontar, dimana bahan bakunya banyak terdapat di desa setempat, dengan pengawasan perbekel yang juga ditunjuk menjadi pendamping dan petugas dari Yayasan Bakti Laksana yang menetap di lokasi kegiatan. Hasil anyaman daun lontar dan dupa dijual di pasar bahkan sampai ke Kota Denpasar dengan harga untuk anyaman satu ikat Rp 25.000, sedang harga dupa untuk ukuran kecil Rp 3.500 dan yang besar Rp 35.000. Dari penjelasan pendamping sosial saat ini masih ada warga yang pernah mendapatkan pelatihan yang masih turun ke kota menjadi pengemis, sehingga pihak pengurus yayasan, perbekel dan pendamping sosial berupaya menyadarkan mereka dengan jalan melakukan pendekatan dan pembinaan mental yang dilakukan dengan mendatangi rumah mereka, dengan harapan dapat menyentuh hati dan perasaan sehingga mereka mau berhenti dari kegiatan mengemis dan lebih fokus membuat anyaman karena telah mendapatkan stimulan yang harus

dipertanggungjawabkan kepada pihak Dinas Sosial dan yayasan sebagai pendamping yang langsung terjun di desa.

Pendorong warga Dusun Muntigunung menjadi pengemis juga karena melihat keberhasilan tetangga yang lebih dahulu pergi ke kota menjadi pengemis, rendahnya semangat juang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang bermartabat dan etos kerja yang rendah serta mudah menyerah, dan kurang memiliki hargadiri, serta lingkungan sosial budaya yang kurang kondusif. Adapun faktor yang dapat mencegah antara lain dengan lebih banyak lagi mendayagunakan potensi dan sumber yang tersedia secara optimal baik potensi alam, sumber daya manusia dan lingkungan sosial budaya. Berkait dengan hal tersebut maka perlu dibangun kegiatan untuk membangkitkan semangat juang agar mereka memiliki etos kerja tinggi dan tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan hidup dan membangun budaya malu mengemis, memperluas akses pekerjaan dengan latihan keterampilan kerja, mencarikan jaringan pemasaran serta pendampingan sosial.

#### **D. SIMPULAN**

Dari temuan penelitian bahwa akar permasalahan warga menjadi gepeng dari Dusun Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu adalah, kepemilikan lahan yang sempit, pendidikan rendah, dan ketiadaan keterampilan serta kondisi geografis yang kurang menguntungkan menjadi penyebab keluarga (informan) mengalami kemiskinan, sehingga mereka hidup dalam status sosial pada strata lapisan paling bawah. Tidak mau terkungkung dalam kemiskinan, mereka mencari penghidupan yang lebih baik, upaya untuk merubah status sosial mereka kearah yang lebih baik dengan melibatkan perempuan dan anak-anak mencari nafkah. Namun karena semangat juang yang rendah, mudah menyerah, dan tidak mampu mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada di desa, mereka pergi ke kota dengan tujuan menjadi pengemis dengan hidup menggelandang selama hidup di kota. Penghasilan sebagai pengemis yang relatif lebih banyak membuat mereka enggan

melepaskan pekerjaannya walaupun beberapa informan sudah lebih dari satu kali terjaring razia petugas namun ternyata tetap tidak membuat jera, karena penghasilan dari pengemis ternyata cukup banyak.

Agar informan dapat berhenti dari kegiatan mengemis bersama-sama dengan pengemis lain yang berjumlah 100 orang, informan mendapatkan pembinaan dari Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Karangasem bekerjasama dengan Yayasan Bakti Laksana berupa bimbingan pelatihan keterampilan pembuatan dupa dan anyaman dari daun lontar untuk sarana sesaji. Setelah mendapatkan pelatihan peserta pelatihan mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 5.000.000,- per orang, diharapkan dengan pelatihan yang diberikan yang disesuaikan dengan keinginan mereka dan bahan yang tersedia di daerahnya serta hasil keterampilan banyak dibutuhkan masyarakat, informan dan peserta lain mendapatkan penghasilan yang sama dengan pada saat masih mengemis sehingga mereka diharapkan akan berhenti dari kegiatan pengemisan.

Berkait dengan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (RSTS) dan dinas terkait agar dalam upaya menyadarkan pengemis agar tidak lagi menjalani kehidupan sebagai gepeng perlu dilakukan pembinaan tidak hanya pembinaan keterampilan saja namun juga perlu dilakukan pembinaan mental spiritual. Agar peserta pembinaan tetap semangat menjalani pekerjaan yang baru sebagai pengrajin, maka pemerintah daerah beserta fihak-fihak yang peduli dengan masalah gepeng seyogyanya berupaya membantu mencari alses pasar yang mau membeli hasil keterampilan mereka secara rutin. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk kelompok kerja (pokja) yang selanjutnya pokja tersebut dapat lebih diberdayakan dengan menumbuhkan semangat keswadayaan dan kewirausahaan, sehingga hasil dari usaha mereka dapat dimanfaatkan menjadi penggerak tumbuhnya usaha bersama dan mampu menjadi sumber penghasilan

di daerah asal pengemis, kegiatan ini dapat melibatkan pendamping sosial yang bertugas mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pelayanan sosial bagi eks pengemis. Selain adanya pokja perlu dibentuk suatu forum paguyuban eks peserta pelatihan dibawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten dan instansi terkait, fungsi forum ini adalah sebagai wadah yang dapat digunakan untuk menampung dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi, yang selanjutnya dapat dilakukan penanganan oleh instansi yang berwenang.

### Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada sumber data penelitian, redaksi, dan mitra bestari atas terselesainya dan terbitnya artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkotsar, (1984), *Advokasi anak jalanan*, Jakarta: Rajawali
- Aswarni Sujud, (1999), *Beberapa Aspek Perkembangan Anak dan PAUD*, Yogyakarta: PSW UII
- Abdul Haris, (2002), *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan Fakta Dibalik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan Sumodiningrat, (2000), *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Binarena Pariwara
- Gede Sedana, (2009), *Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Pengemis Kasus di Denpasar, Gianyar, dan Singaraja*, <https://gedesedana.wordpress.com/2009/07/faktor-penyebab-terjadinya-gelandangan-dan-pengemis>
- Ikawati, (2015), *Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, volume 14, Yogyakarta: Ash Shaff
- Istiana Hermawati dkk, (2015), *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Oscar Lewis, (1988), *Kisah Lima Keluarga, Telaah-Telaah Kasus Orang Meksiko*

- Dalam Kebudayaan Kemiskinan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, (2012), *Tentang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial*
- Departemen Sosial, (2003), *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Badiklit Kesos
- Suharsimi Arikunto, (2001), *Managemen penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta
- Sri Kuntari, (2008), *Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah*, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Sutomo, (2008), *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tateki Yoga Tursilarini, Andayani Listyawati, (2015), *Peranan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 39, Yogyakarta: Badiklit Kesos, B2P3KS Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 *Tentang kesejahteraan Sosial*
- Y Argo Twikromo, (1999), *Gelandangan Yogyakarta Suatu Kehidupan dalam Bingkai Tatanan Sosial Budaya Resmi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Safri Mangkupawiro/Mengapa menjadi pengemis/  
<http://firdha09060140.student.UMM.co.id/2010/02/05/mengapa-menjadi-pengemis/dikutip-pada-hari-kamis-23-02-2017-pukul-13.55>
- <http://news.liputan6.com/read/2363627/ini-penyebab-maraknya-pernikahan-dini>

